

## BAB VI

### KONSEP KEMASLAHATAN PANCASILA SEBAGAI ALTERNATIF LABA

*“...profits can be maximized demonstrates that accounting is used to rationalize the interests of the capitalist class...”*  
(Chwastiak 2013:34)

#### 6.1 Pengantar

Kajian terhadap laba tidak lepas dari tujuan dari aktivitas perekonomian. Jika aktivitas perekonomian dilandasi oleh kepentingan materi, laba akan mengikuti hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa laba sarat terhadap kepentingan dari para pelaku aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, saya melihat terdapat sesuatu yang wajar jika Chwastiak (2013) berani menuding keuntungan akuntansi berbasis PAT ditujukan hanya kepada masyarakat kapitalis. Bahkan, Chwastiak (2006;2013;2015) pada tulisan yang lainnya berani mengatakan bahwa keuntungan akuntansi berbasis PAT menjadi sebuah komoditas penjajahan ekonomi.

Ketika laba dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan, khususnya pada masyarakat Indonesia, terjadilah pertentangan. Laba, yang berasal dari ideologi kapitalisme, memiliki nilai-nilai egoistik dan mengarahkan manusia kepada kepentingannya sendiri (Triyuwono, 2012). Hal ini tentu berkebalikan dengan jati diri masyarakat Indonesia yang berpatokan kepada semangat sosialisme berketuhanan (Latif, 2014). Oleh karena itu, masyarakat Indonesia memerlukan laba yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pembahasan sebelumnya telah mengonstruksi karakter manusia, keberadaan Tuhan, dan tujuan akuntansi dalam perspektif Pancasila. Hal ini tentu menjadi urgensi untuk turut mengubah laba dalam perspektif Pancasila.

Perubahan terhadap laba juga perlu dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap ideologi bangsa. Jika karakteristik manusia, keberadaan Tuhan, tujuan, dan laba telah sesuai dengan koridor Pancasila, bangsa Indonesia menemukan pedoman untuk menuju aktivitas perekonomian yang utuh.

Pada sisi lainnya, terdapat konsep Nilai Tambah Pancasila yang hadir sebagai antitesis dari keuntungan berbasis PAT. Konsep Nilai Tambah Pancasila digagas oleh Parikesit (2012a) dengan mengombinasikan unsur materi dan nonmateri sebagai indikator laba. Meskipun demikian, konsep ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya sebagai antitesis karena unsur materi dan *self interest* masih terakomodasi dalam indikator keberhasilan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, koreksi terhadap konsep ini perlu dilakukan untuk memberikan laba yang merefleksikan jiwa bangsa Indonesia.

Bab ini pada dasarnya berbicara mengenai laba dalam perspektif Pancasila sekaligus memberikan koreksi terhadap Nilai Tambah Pancasila. Pembahasan awal dari bab ini adalah menguraikan relevansi konsep Nilai Tambah Pancasila bagi jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, bab ini menguraikan sejumlah nilai yang dapat menjadi antitesis dari konsep Nilai Tambah Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian membentuk konsep baru yang menjadi laba yang benar-benar memuat jati diri bangsa Indonesia.

## **6.2 Relevansi Nilai Tambah dalam Perspektif Pancasila**

Perkembangan akuntansi dalam perspektif Pancasila sejatinya melahirkan dialektika yang menarik khususnya ketika dihubungkan dengan *status quo* yang sudah membentuk hegemoni. Konsep Nilai Tambah Pancasila (*Pancasila value added*) merupakan antitesis dari *status quo* tersebut yang mencoba menempatkan unsur nonmateri dalam pengembangan akuntansi (Parikesit, 2012a; Sitorus, 2016a). Konsep ini digagas oleh Parikesit (2012a) dengan mendekonstruksi Nilai

Tambah Syariah (*Syariah value added*) yang dibuat oleh Triyuwono (2011). Selain itu, konsep ini juga mendasarkan diri pada *enterprise theory* yang menekankan kesejahteraan bersama dalam aktivitas perekonomian (Parikesit, 2012b). Dalam perspektif lainnya, konsep ini juga merupakan kelanjutan dari tulisan Cahyanto dan Parikesit (2011) yang menekankan perlunya perubahan sistem ekonomi secara radikal untuk mewujudkan sistem etika Pancasila.

**Gambar 6.1 Konsep Nilai Tambah Pancasila**



**Sumber: Parikesit (2012a)**

Konsep Nilai Tambah Pancasila pada dasarnya berbicara mengenai posisi keuntungan yang sejatinya tidak terbatas pada hal-hal materi. Posisi ini tercermin dalam ketiga nilai (lihat Gambar 6.1) yang dijadikan landasan bagi entitas dalam memproses aktivitas ekonomi, yaitu ekonomi, mental, dan spiritual. Melalui ketiga nilai tersebut, akuntansi (dan manusia) diarahkan untuk tidak menjadikan materi sebagai prioritas utama (Parikesit, 2012a), layaknya keuntungan materi pada PAT. Selain itu, konsep Nilai Tambah Pancasila diharapkan dapat mengarahkan manusia untuk tidak bersikap egois dan mengutamakan kebersamaan dalam aktivitas perekonomian (Sitorus, 2015). Meskipun demikian, telaah kritis terhadap konsep ini sangat perlu untuk dilakukan, khususnya ketika membandingkan dengan posisi Pancasila sebagai ideologi antikompromi.

Saya tidak memungkiri bahwa konsep Nilai Tambah Pancasila menunjukkan kesan “lebih mulia” jika dibandingkan dengan konsep laba berbasis

ekonomi sebagai pengukuran berbasis PAT. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi dalam konsep Nilai Tambah Pancasila, khususnya ketika dihadapkan dengan *positive accounting theory* (PAT) sebagai antitesis. *Pertama*, posisi materi dalam Nilai Tambah Pancasila. Konsep ini tidak menghilangkan unsur materi meskipun secara implisit tidak meletakkannya sebagai prioritas utama (lihat Gambar 6.1). Meskipun Parikesit (2012a) meletakkan unsur lain dalam prinsip Nilai Tambah Pancasila, hal ini tidak berarti manusia harus menanggalkan materi. Dengan perkataan lain, akuntansi (dan manusia) “diharuskan” mengejar materi dan unsur-unsur lain (*the other*) dalam realitas kehidupan. Oleh karena itu, asumsi manusia sebagai *homo economicus* tidak dihilangkan dalam konsep ini, tetapi juga diseimbangkan dengan unsur lainnya.

Kita harus menyadari bahwa unsur materi sesungguhnya memenjarakan akuntansi (dan manusia) dalam bayang-bayang kapitalisme (Tinker, Merino dan Neimark, 1982). Ketika materi tetap dijadikan indikator dalam aktivitas perekonomian, penjara tersebut tetap ada walaupun terdapat unsur lain yang merupakan antitesisnya (Bellamy dan Foster, 2013; Brown, Dillard dan Hopper, 2015). Sesuatu benar-benar dapat dikatakan bebas ketika benar-benar meninggalkan unsur yang memenjarakan (Kamayanti 2013;2015). Oleh karena itu, penempatan materi sebagai indikator dalam konsep Nilai Tambah Pancasila hanya menunjukkan bahwa konsep ini merupakan bentuk lain dari laba.

Konsep penyeimbangan kebutuhan materi dan nonmateri sebenarnya memiliki “maksud baik” supaya manusia tidak terpatok kepada satu unsur semata (Parikesit, 2012b). Meskipun demikian, konsep seperti ini sejatinya membuat manusia bingung menentukan prioritas dalam kehidupannya. Manusia memang dianugerahi segala macam unsur untuk mengejar kedua unsur tersebut (Triyuwono, 2015c). Namun demikian, manusia juga memiliki keterbatasan selama

dirinya berada dalam dunia yang fana sehingga tidak mungkin manusia bisa mengejar kedua unsur sekaligus.

Keterbatasan inilah yang sejatinya menuntut manusia untuk memiliki prioritas dalam mengejar unsur kehidupan. Manusia harus memilih unsur yang paling terpenting dalam realitas kehidupannya. Permasalahan ini tampak dalam konsep Nilai Tambah Pancasila yang masih mengarahkan manusia untuk memprioritaskan unsur materi. Hal ini dapat dibuktikan dari diagram di atas (Gambar 6.1) di mana materi masih menjadi nilai utama (selain mental dan spiritual) dalam proses aktivitas perekonomian. Selain itu, konsep keadilan sosial yang digagas sebagai hasil akhir Nilai Tambah Pancasila juga terbentur dalam realitas materi dengan pernyataan “sesuai dengan porsinya” (lihat Gambar 6.1).

Konsep Nilai Tambah Pancasila memang mengadopsi Nilai Tambah Syariah yang bertujuan mengarahkan manusia kepada Tuhan (Triuwono, 2011). Meskipun demikian, konsep nilai tambah secara umum hanya didesain sebagai tambahan dari laporan keuangan perusahaan (Mulawarman, 2006). Konsep laba dalam PAT masih menjadi patokan utama dalam keberhasilan entitas. Selain itu, apabila kita mencermati secara saksama, konsep nilai tambah secara umum sejatinya hanya merupakan modifikasi atas laba yang dibuat dengan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholders* (Saputro dan Triuwono, 2009). Sifat modifikasi ini kemudian berimplikasi terhadap terbenturnya konsep nilai tambah pada metode perhitungan yang bersifat materi (Mulawarman, 2006). Dengan demikian, manusia tetap mengutamakan materi walaupun sudah ada konsep nilai tambah sekalipun.

*Kedua*, kedudukan ego dalam realitas kehidupan. Konsep Nilai Tambah Pancasila Hanya menyeimbangkan semangat persaudaraan dan tidak meninggalkan ego manusia (Parikesit, 2012a; Triuwono, 2012). Dalam hal ini, konsep Nilai Tambah Pancasila memandang bahwa manusia tetap mengejar

keinginan pribadi walaupun terdapat kesadaran terhadap pentingnya kebersamaan. Hal ini tentu saja patut menjadi sorotan karena sejatinya ego merupakan penjara bagi kehidupan manusia (lihat bab 2 dan 4). Selain itu, konsep Nilai Tambah Pancasila yang masih terbentur oleh materi tentunya masih memancing manusia untuk mengutamakan ego daripada semangat persaudaraan (Sitorus, 2015). Dengan demikian, konsep Nilai Tambah Pancasila hanya mereduksi efek dan tidak menghilangkan penjara yang ditimbulkan oleh PAT.

Ada hal yang membingungkan ketika konsep Nilai Tambah Pancasila mengarahkan kepada semangat persaudaraan dan ego sekaligus. Pada satu sisi, kita harus menyadari bahwa tidak semua manusia memiliki keinginan seragam, khususnya ketika dihadapkan kepada realitas kehidupan. Pada sisi lainnya, konsep Nilai Tambah Pancasila juga memandang adanya kepentingan bersama sebagai unsur kemaslahatan akuntansi. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan ketika masing-masing individu mengalami perbedaan kepentingan khususnya dalam proses akuntansi.

Pembahasan sebelumnya (bab 2) telah menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi antikompromi. Sikap antikompromi juga memiliki makna bahwa manusia tidak bisa memilih antara kepentingan pribadi dan bersama sekaligus. Oleh karena itu, sila ketiga Pancasila hadir supaya manusia menyingkirkan kepentingan pribadi demi kemaslahatan bersama. Ketika Nilai Tambah Pancasila mengakomodasi dua kepentingan sekaligus dalam proses akuntansi, hal ini dapat berarti terdapat pertentangan dengan sila ketiga Pancasila.

Secara garis besar, konsep nilai tambah dapat menjadi celah bagi tumbuhnya kapitalisme (Saputro dan Triyuwono, 2009). Hal ini terjadi karena konsep ini masih melakukan kompromi terhadap unsur materi walaupun unsur-unsur nonmateri terakomodasi. Dalam perspektif ini, perusahaan atau entitas mendapatkan pembenaran untuk mengejar unsur materi selama unsur-unsur

nonmateri masih terakomodasi (Edgley, 2014). Oleh karena itu, laba (terutama berbasis Pancasila) harus memiliki ketegasan untuk memprioritaskan unsur materi ataupun nonmateri.

*Ketiga*, kedudukan Tuhan dalam kehidupan manusia. Konsep Nilai Tambah Pancasila memang meletakkan unsur spiritualitas dalam pengembangan aktivitas perekonomian (Parikesit, 2012a; Sitorus, 2016a). Konsep ini juga meletakkan unsur ketuhanan sebagai awal dari aktivitas perekonomian berbasis Pancasila (lihat Gambar 6.1). Meskipun demikian, konsep Nilai Tambah Pancasila tidak meletakkan nilai ketuhanan sebagai prioritas utama akuntansi. Konsep ini hanya memberikan kedudukan Tuhan yang sejajar dengan kepentingan manusia (dalam hal ini adalah materi, lihat Gambar 6.1). Hal ini juga berlaku pada nilai spiritualitas yang belum tegas pemosisiannya pada realitas kehidupan.

Soekarno (1964) selaku *founding father* dari Pancasila memang menyatakan bahwa Tuhan bersemayam pada diri kaum miskin di mana kemiskinan yang dimaksud merujuk kepada nilai materi. Hal ini juga sesuai dengan sifat dan keberadaan Tuhan dalam pengembangan akuntansi berbasis Pancasila (lihat Bab 4). Meskipun demikian, hal ini tidak lantas menjadi legitimasi pada penyejajaran nilai ketuhanan terhadap kepentingan manusia. Pernyataan tersebut menunjukkan supaya manusia justru menyatukan Tuhan dengan sesama (lihat prinsip kemanunggalan) dan tidak merujuk kepada penyejajaran unsur materi. Sebaliknya, kepentingan manusia tentu tidak dapat disejajarkan dengan kehendak Tuhan sebagai *causa prima*. Oleh karena itu, saya melihat adanya sebuah kesalahan apabila nilai ketuhanan disejajarkan dengan materi.

Selanjutnya, saya berbicara mengenai nilai spiritualitas pada Nilai Tambah Pancasila. Secara hakikat, spiritual (barat) sejatinya dapat terjadi tanpa adanya peranan Tuhan dalam realitas kehidupan. Spiritual jenis ini adalah mengonstruksi Tuhan dalam bayangan rasionalitas manusia (Griffin, 1989; Caiazza, 2007).

Dalam hal ini, manusia bisa menjalani hidup tanpa adanya agama karena telah “memiliki” Tuhan sesuai dengan bayangannya sendiri (Gross, Diab dan Davies, 2013).

Konsep seperti ini tentu akan menjadi rancu dengan hakikat keberadaan agama dalam realitas kehidupan manusia. Soekarno (1945) sebagai pelopor Pancasila secara tegas memberikan ilustrasi agama dalam pidato kelahiran ideologi ini. Hal ini menunjukkan bahwa agama juga mendapatkan pengakuan pada realitas kehidupan manusia dalam bertuhan, khususnya pada aspek akuntansi. Selain itu, sejumlah kalangan di Indonesia menjadikan agama sebagai *way of life*, khususnya dalam bidang laba (lihat Mulawarman 2010; Kamayanti 2017). Hal ini yang menjadi alasan utama bahwa nilai spiritualitas sebaiknya dihapus dalam akuntansi Pancasila.

*Keempat*, asas dekonstruksi yang digunakan dalam merumuskan Nilai Tambah Pancasila. Konsep ini tidak berdiri dalam paradigma Pancasila, tetapi menggunakan asas dekonstruksi yang notabene berasal dari paradigma posmodernisme (Parikesit, 2012a). Selain itu, asas dekonstruksi tidak mencari nilai kebenaran sejati, tetapi membuat konsep baru yang tidak tunggal melalui sinergi oposisi binernya (Riduwan *et al.*, 2010; Triyuwono, 2012; Sitorus, 2015). Bahkan, asas ini juga bisa memasukkan nilai kejahatan dalam realitas kehidupan (Kamayanti, 2013). Oleh karena itu, asas inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari sikap kompromi Nilai Tambah Pancasila terhadap modernitas.

Penggunaan asas dekonstruksi pada akhirnya menyebabkan tereduksinya hakikat kebenaran Pancasila. Pancasila yang seharusnya menjadi sumber kebenaran pada akhirnya berubah menjadi nilai relatif melalui asas dekonstruksi. Dalam hal ini, sifat Pancasila sebagai ideologi antikompromi hilang karena terdapat unsur akomodatif terhadap nilai-nilai lain yang bertentangan dengan pemikirannya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas ideologi Pancasila yang



seharusnya menyatu dalam jiwa masyarakat Indonesia (Latif, 2014). Bahkan, Pancasila seharusnya menjadi paradigma tersendiri dalam merangkai realitas kehidupan (lihat Bab 2).

Berdasarkan uraian di atas, konsep Nilai Tambah Pancasila pada akhirnya melahirkan celah kapitalisme dan ego dalam realitas kehidupan. Selain itu, konsep Nilai Tambah Pancasila masih membenturkan nilai ketuhanan dan spiritualitas yang pada akhirnya memunculkan distorsi terhadap peran agama. Oleh karena itu, konsep Nilai Tambah Pancasila masih menyisakan celah untuk bertumbuhnya PAT dalam realitas kehidupan. Dengan demikian, koreksi terhadap konsep ini merupakan langkah penting dalam membentuk Pancasila sebagai alat pembebasan yang seutuhnya.

### **6.3 Nilai Keikhlasan sebagai Antitesis Materi**

Nilai keikhlasan pada dasarnya merupakan unsur terpenting bagi pengembangan akuntansi khususnya ketika dikaitkan dengan Pancasila. Nilai ini bahkan jauh lebih mulia daripada materi yang masih terbatas pada unsur duniawi. Nilai inilah yang membedakan manusia sebagai *homo economicus* dengan *homo pancasilaus*. Bahkan, keikhlasan merupakan tanda bahwa manusia tidak lagi bersifat egois dan menggantungkan kehidupannya kepada kehendak Tuhan (Triyuwono, 2011; Nadjib, 2015).

Keikhlasan merupakan sikap kerelaan untuk hidup dalam kemaslahatan (Nadjib, 2013) sehingga materi tidak menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, ikhlas juga berarti berjuang menegakkan keadilan karena terdapat realitas yang termarginalkan akibat kehidupan modern (Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016). Kedua hal ini tentu bermuara pada satu pusat ideologi kebangsaan, yaitu Pancasila. Pancasila sejatinya merupakan sistem yang dibangun atas dasar keikhlasan, baik dalam kerelaan maupun perjuangan

(Soekarno, 2001; Bakry, 2010; Kaelan, 2010). Masyarakat Indonesia tidak mungkin bisa bersatu jika seluruh kalangan tidak memiliki keikhlasan berbasis nilai Pancasila (Latif, 2014).

Dalam sudut pandang Pancasila, keikhlasan termanifestasi melalui beberapa cara. *Pertama*, keikhlasan sebagai kerelaan. Kita tahu bahwa PAT telah membentuk manusia menjadi pribadi yang oportunistik dan materialistik. Kita juga tahu bahwa akuntansi modern telah mencetak manusia untuk mendapatkan *feedback* ketika berhadapan dengan realitas kehidupan, terutama dari segi ekonomi. Jika asumsi seperti ini dipertahankan secara kontinu, saya merasa pada jangka panjang masyarakat Indonesia dilanda perpecahan. Perpecahan tersebut bukan hanya terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga bersifat multidimensi.

Masyarakat Indonesia memiliki jati diri sebagai pribadi yang memiliki jiwa rela berkorban dalam realitas kehidupan (Nadjib, 2015). Mereka rela bukan demi kepentingan diri sendiri, tetapi terdapat kesadaran bahwa kehidupan tidak bisa bergantung kepada ego semata (Swasono, 2014). Bahkan, masyarakat Indonesia sejatinya menyadari bahwa kejayaan dapat diraih dengan penuh kerelaan hati (Nadjib, 2013). Oleh karena itu, akuntansi (baik itu PAT maupun Nilai Tambah Pancasila) yang hanya terpaku kepada unsur materi sejatinya mereduksi (bahkan mengingkari) jati diri bangsa Indonesia. Ketika manusia dan akuntansi berlandaskan kepada kerelaan, tatanan perekonomian yang saling membangun dapat terwujud.

Konsep seperti ini bertentangan terhadap proses bisnis berbasis PAT yang tidak berlandaskan kerelaan hati (Lamberton, 2015). Setiap pihak selalu tertuju kepada peningkatan keuntungan materi yang sebesar-besarnya demi “keberlangsungan” hidupnya (Brooks dan Dunn, 2015). Dalam pengertian lain, setiap pihak tidak dapat hidup ketika tidak memperoleh keuntungan materi. *Nah*, konsep ini pada akhirnya meningkatkan nafsu manusia terhadap keuntungan

materi dan meningkatkan kecurangan proses bisnis (Boyce, 2014). Dengan demikian, kita bisa mempertanyakan apakah keuntungan materi relevan jika dijadikan indikator dalam proses bisnis.

Pada sisi lainnya, konsep bisnis yang tidak berlandaskan kepada kerelaan hati merupakan upaya invasi dari negara barat untuk meraih kesuksesan ekonomi. Bryer (2012) setidaknya membuktikan hal tersebut melalui tulisannya. Dia mengatakan bahwa konsep laba secara materi merupakan upaya Amerika untuk meraih kesuksesan dalam globalisasi. Dia juga mengatakan bahwa kapitalisme dapat berjalan dengan langgeng karena peran Amerika dalam dominasi globalisasi. Tulisan ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Andrew (2016) serta Tinker dan Sy (2012) yang menemukan bahwa terjadi perubahan ideologi ekonomi di Cina dari sosialisme kepada kapitalisme. Hal ini terjadi karena pemerintah ingin memenangkan persaingan global dalam merebut materi. Dengan demikian, ketika kita masih berpatokan kepada materi, negara-negara tersebut telah berhasil menanamkan (*embodying*) pemikirannya dalam onani akuntansi (Kamayanti, 2017).

*Kedua*, keikhlasan sebagai bentuk perjuangan. Saya telah menjelaskan bahwa PAT dan laba telah menciptakan bentuk ketidakadilan dari seluruh realitas kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana kita harus bersikap terhadap ketidakadilan ini? Apakah kita harus diam dan membiarkan terjadinya penindasan terhadap seluruh realitas kehidupan? Hal ini dapat dijabarkan dalam kedudukan Pancasila sebagai ideologi antikompromi. Pancasila bukanlah ideologi yang diam ataupun mendukung penjajahan (Soekarno, 2001). Pancasila merupakan ideologi yang menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama berjuang menghadapi penjajahan dari segala aspek (Latif, 2015). Kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh diam ketika realitas kehidupannya dirampas oleh pihak lain.

Kita harus menyadari bahwa laba saat ini hanya mengarahkan manusia untuk diam atas ketidakadilan. Konsep laba PAT hanya mengarahkan manusia untuk menjadi pengeruk dan “peramal” materi semata (Boot, 2012). Selain itu, keadilan distributif yang sudah melekat pada PAT telah menjadikan manusia terbentur pada unsur terukur sehingga ketidakadilan nonmateri tidak layak untuk diperdebatkan (McKernan dan MacLulich, 2004). Sebaliknya, konsep Nilai Tambah Pancasila hanya berusaha menambahkan indikator lain dalam akuntansi tanpa adanya arahan untuk berjuang dengan bersandar pada pemikiran posmodernisme di mana kebenaran serba relatif (Kamayanti, 2013). Dalam pemaknaan lain, konsep Nilai Tambah Pancasila memiliki nilai kompromi karena baginya setiap asumsi merupakan kebenaran masing-masing (Griffin, 1989; Sitorus, 2015).

Ideologi Pancasila tidak mengajarkan masyarakat Indonesia untuk diam terhadap penjajahan. Pancasila tidak memberikan arahan kepada masyarakat Indonesia untuk bersikap layaknya pembantu ataupun budak negara lain. Bahkan, Soekarno (1964) sekalipun berani mengatakan *go to hell with your aid* untuk menunjukkan semangat perjuangan melawan imperialisme. Hal ini berarti bahwa Pancasila mengarahkan masyarakat untuk menjadi pejuang atas penjajahan (Latif, 2014), termasuk dalam akuntansi. Akuntansi harus menjadi penggerak bagi masyarakat untuk melawan kebatilan penguasa (Kusdewanti *et al.*, 2014; Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016), bahkan bukan tidak mungkin menjadi penggerak masyarakat untuk menuju keutuhan peradaban (Mulawarman, 2013a).

Pada sisi lainnya, saya telah membahas bahwa tujuan akuntansi Pancasila dan *homo pancasilaus* adalah amanah. Sebuah amanah baru dapat terwujud ketika setiap organ kehidupan (termasuk akuntansi) berjuang bersama-sama menegakkan peradaban kehidupan (Swasono, 2014). Perjuangan ini baru dapat dicapai ketika masyarakat telah menyadari bahwa Pancasila, yang telah diakui

sebagai landasan kehidupan, harus ditegakkan dalam situasi apa pun (Swasono, 2013). Jika roh perjuangan tidak diletakkan dalam laba, masyarakat tidak dapat bergerak mewujudkan amanah karena mereka hanya fokus kepada materi semata. Oleh karena itu, saya melihat adanya urgensi bagi akuntansi Pancasila untuk memberikan roh perjuangan dalam alternatif laba.

Kedua konsep tersebut sejatinya saling berhubungan satu sama lain. Perjuangan baru dapat terwujud jika seluruh realitas kehidupan memiliki kerelaan hati dan mengesampingkan materi. Sebaliknya, kerelaan hati hanya dapat dikatakan sebagai candu jika tidak disertai dengan semangat perjuangan. Kedua konsep tersebut kemudian melebur menjadi keikhlasan bermartabat, yang tidak hanya sekadar membiarkan penjajahan terjadi. Keikhlasan seperti ini tidak menjadikan manusia sebagai pemburu materi, tetapi mereka semakin peduli terhadap ketidakadilan. Keikhlasan seperti ini tidak membentuk rezim bersaing layaknya PAT, tetapi peradaban yang saling berjuang demi kemaslahatan bersama. Inilah bentuk keikhlasan akuntansi yang berciri khas ideologi Pancasila.

Saya tidak mengatakan bahwa manusia sama sekali diharamkan mencari materi pada realitas kehidupan (lihat pula pembahasan bab 3 dan 4). Meskipun demikian, saya juga memandang bahwa materi hanya dapat dijadikan sebagai penunjang semata karena unsur ini hanya dapat digunakan sebagai alat dan bukan nilai. Jika materi dijadikan sebagai nilai, manusia terlecut untuk mengejarnya, bahkan melupakan Tuhan sekalipun (Mulawarman dan Kamayanti, 2016). Selain itu, sistem ekonomi (dan akuntansi) yang tetap menjunjung tinggi materi pada akhirnya melahirkan jarak antarmasyarakat, walaupun mendeklarasikan dirinya berpihak kepada rakyat (Tjokroaminoto, 2010). Dengan demikian, materi tidak relevan jika dijadikan sebagai nilai dalam laba.

Konsep seperti ini persis dengan pemikiran HOS. Tjokroaminoto ketika melakukan pergerakan nasional. Beliau mendirikan koperasi demi mengangkat

derajat masyarakat yang telah tertindas oleh penjajah (Mulawarman, 2015). Jika hal ini dipandang dalam segi laba berbasis materi, seorang Tjokroaminoto tidak mungkin melakukannya karena terdapat kerugian. Dalam perspektif lainnya, Tjokroaminoto menolak bekerja sama dengan pihak sosialis, yang notabene menentang penjajahan dan kapitalisme, karena pemikiran ini masih berbasis materi (Mulawarman, 2013a). Beliau memandang bahwa kapitalisme dan sosialisme merupakan ideologi yang tidak bertuhan (Tjokroaminoto, 2010) sehingga tidak pantas dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebaliknya, beliau melihat bahwa masyarakat dari berbagai golongan harus bersatu dalam ketertundukan kepada Tuhan (Tjokroaminoto, 2010; Mulawarman, 2013a).

Pemikiran lainnya adalah Nyai Ontosoroh<sup>28</sup> yang mendirikan pabrik gula demi kemaslahatan masyarakat. Beliau melihat bahwa masyarakat setempat telah terjajah oleh pihak Belanda dalam berbagai aspek (Toer, 2005; Ramli dan Aziz, 2013). Meskipun pabrik gula tersebut mengalami kerugian secara materi dan direbut oleh pihak lain, beliau tetap berusaha untuk mempertahankannya (Toer, 2006). Beliau memandang bahwa jika pabrik gula jatuh pada pihak lain atau ditutup, maka masyarakat setempat tidak dapat mencari nafkah (Ramli dan Aziz, 2013). Hal ini tentu menjadi refleksi bagi manusia dan akuntansi mengenai kedudukan materi dalam realitas kehidupan terutama mengenai kebenaran untuk memperjuangkan unsur ini.

Kedua pemikiran tersebut menunjukkan bahwa sejatinya keikhlasan bukan hal yang mustahil untuk diterapkan. Keikhlasan bukan menjadi sesuatu yang mustahil diterapkan asalkan setiap realitas kehidupan memiliki nilai tersebut. Ketika hal tersebut berhasil dilaksanakan, \ sistem ekonomi (dan akuntansi) dan

---

<sup>28</sup> Nyai Ontosoroh merupakan karakter imajiner yang digagas oleh Pramoedya Ananta Toer (2005;2006) dalam novel tetralogi "Buruh." Dalam perspektif akuntansi, Sitorus et al. (2016) memformulasikan cara pandang Nyai Ontosoroh sebagai perlawanan terhadap *agency theory*.

manusia yang utuh dapat terwujud. Manusia tidak lagi memikirkan materi sebagai indikator keberhasilan aktivitas kehidupan. Sebaliknya, sistem ekonomi dan akuntansi memiliki nilai kearifan yang mengarahkan manusia untuk tidak terbatas kepada materi.

#### **6.4 Nilai Kebersamaan sebagai Antitesis Ego**

Laba dalam semangat kebersamaan merupakan upaya untuk mengembalikan jati diri manusia dalam semangat keutuhan. Hal ini disebabkan oleh sifat laba pada PAT yang memiliki sifat egois dan berujung kepada sikap saling bersaing (Hines, 1988). Bukan hanya itu, sifat egois pada PAT pada dasarnya mengubah norma dan etika masyarakat yang pada awalnya menjunjung tinggi kebersamaan (Smith, 2011). Implikasinya, masyarakat yang pada awalnya saling membangun kemudian berubah menjadi sebuah kanibal karena laba berbasis sifat egois (Schneider, 2012). Hal ini tentunya harus diubah dengan laba berbasis sifat kebersamaan.

Konsep Nilai Tambah Pancasila digagas untuk meniadakan sifat egoisme akuntansi dengan mengangkat kebersamaan dalam proses akuntansi (Parikesit, 2012a; Sitorus, 2015). Meskipun demikian, konsep ini masih menunjukkan sikap ego dalam akuntansi meskipun tidak sebesar keuntungan berbasis PAT (Parikesit, 2012a). Selain itu, konsep ini sejatinya memiliki ketidakjelasan arah akuntansi dengan menampilkan dua nilai yang saling bertentangan. Pada akhirnya konsep nilai tambah masih mengedepankan sifat egois (Saputro dan Triyuwono, 2009) walaupun terdapat Pancasila sebagai alat konstruksi.

Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui ilustrasi singkat berikut ini. Kalangan termarginalkan sekalipun tidak bersikap egois walaupun hasil yang diterima termasuk dalam kategori tidak halal.

Mereka melakukan pekerjaan terlarang karena terdapat sistem ketidakadilan di dalamnya (Molisa, 2013; Haynes, 2017)<sup>29</sup>. Meskipun demikian, mereka mendistribusikan hasil yang didapat bukan kepada dirinya semata, melainkan kepada orang-orang sekitar (Molisa, 2013). Bahkan, Dahlan (2016) menggunakan kisah kalangan termarginalkan untuk menyindir sejumlah kalangan yang terlalu merasa benar dalam proses pencarian jati diri kepada Tuhan.

Hal ini tentu menjadi refleksi bagi manusia dan akuntansi dalam bertuhan. Keikhlasan menjadi urgensi di tengah situasi global yang selalu terpaku pada laba (Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016). Bahkan, keikhlasan merupakan sesuatu yang tidak dipandang oleh laba modern yang masih berkompromi terhadap materi karena masih mengandalkan ego (Molisa, 2011; Kamayanti, 2013).

Pada sisi lainnya, semangat kebersamaan merupakan sesuatu yang sangat mengusik atau bahkan ditakuti oleh para penjajah akuntansi<sup>30</sup>. Ketika akuntansi dan manusia memiliki kesatuan visi, mereka bergerak bersama untuk menegakkan kemaslahatan (Mulawarman, 2013b). Semangat kebersamaan ini membuat penjajah tidak bisa mewujudkan kepentingannya untuk mengeruk materi sebesar-besarnya (Soekarno, 2001). Bahkan, penjajah bisa terusir karena *people power* dari seluruh lapisan masyarakat (Kusdewanti *et al.*, 2014). Dalam perspektif lain, jika kebersamaan telah menjadi roh pemersatu, penjajah harus memilih antara tunduk kepada masyarakat supaya bisa beroperasi atau keluar. Oleh karena itu, penjajah menggunakan akuntansi berbasis sifat egois untuk memecah

---

<sup>29</sup> Molisa (2013) menggambarkan hal tersebut dalam sistem akuntansi yang diam terhadap ketidakadilan terhadap manusia. Selain itu, Haynes (2017) mengungkap bahwa akuntansi menyebabkan munculnya tindakan kekerasan terhadap wanita. Oleh sebab itu, saya merasa perlu untuk mengaitkan sifat akuntansi modern dengan kondisi pelacur.

<sup>30</sup> Chwastiak (2015) berpendapat bahwa akuntansi merupakan alat bagi agen mata-mata (dalam hal ini The Central Intelligence Agency (CIA)) sebagai strategi bisnis. Pendapat tersebut tentu muncul dari pergerakan politik antarnegara untuk melakukan hegemoni ekonomi (Chwastiak dan Lehman, 2008).



(*devide et impera*) seluruh golongan masyarakat (Sitorus, Habibaty dan Triyuwono, 2016).

Sikap seperti ini sangat tampak dalam reformasi agraria di Paraguay. Para petani dan masyarakat kelas bawah memiliki satu keyakinan bahwa kapitalisme telah merebut hajat hidup mereka. Mereka telah merasa jenuh dengan kapitalisme yang hanya berpihak kepada kalangan multinasional, tetapi menindas dirinya (Sudjatmiko, 2014). Selain itu, masyarakat merasa bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional (yang tentunya berbasis PAT) hanya ditujukan kepada investor semata (Recalde, 2013). Oleh karena itu, mereka memilih Fernando Lugo sebagai Presiden Paraguay demi membasmi kapitalisme. Mereka menaruh harapan kepada Fernando Lugo mengingat kedekatannya kepada masyarakat bawah di mana hal tersebut tidak dimiliki oleh figur lainnya (Pozas, 2012).

Setelah Fernando Lugo terpilih, banyak aturan yang diubah demi mewujudkan keberpihakan bagi masyarakat kalangan bawah. Paraguay yang pada awalnya menciptakan karpet merah bagi investor dalam sekejap berubah menjadi tanah perjuangan petani (Gott, 2008; Recalde, 2013). Hal ini kemudian memancing sejumlah gerakan reformasi agraria demi menegakkan keadilan bagi masyarakat kelas bawah (Sudjatmiko, 2014). Implikasinya, para investor menggunakan kekuatan finansial demi menjatuhkan seorang Fernando Lugo. Pada akhirnya seorang Fernando Lugo benar-benar kalah oleh kekuatan politik yang dimiliki oleh perusahaan multinasional (Gott, 2008). Reformasi agraria yang digalang sebagai perang terhadap laba akhirnya takluk oleh kepentingan perusahaan multinasional.

Dalam konteks keindonesiaan, kebersamaan dalam akuntansi juga tampak ketika Soekarno (1960) menawarkan Pancasila sebagai *kredo* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beliau merasa bahwa kapitalisme telah

membawa penjajahan kepada masyarakat seluruh dunia. Pidato tersebut kemudian berimplikasi terhadap munculnya pergerakan sosial yang berusaha memerdekakan negara-negara kecil dari penjajahan bangsa barat (contoh: Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan The New Emerging Forces (NEFO)).

Pidato tersebut turut berimbas kepada perubahan pengembangan akuntansi di Indonesia. Beberapa tahun setelah pidato tersebut, seluruh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia mengalami nasionalisasi sehingga investor luar negeri harus angkat kaki. Seluruh kegiatan perekonomian didominasi oleh pemerintah dan masyarakat lokal walaupun jarak kemiskinan semakin melebar (Harahap, 2013). Hal ini turut berimbas terhadap proses akuntansi yang mengutamakan keberadaan masyarakat daripada eksistensi korporasi (Rosser, 1999). Sayangnya, hal tersebut tidak berlanjut setelah Soekarno tidak lagi menjabat sebagai presiden. Setelah Soekarno tidak menjadi presiden, sistem ekonomi dan akuntansi Indonesia masuk dalam hegemoni perusahaan multinasional dan lembaga pendanaan internasional (Shonhadji, 2015). Ya, pemikiran dan kebijakan Soekarno, yang berbasis kepada kedaulatan masyarakat, tidak dapat diteruskan oleh para penerusnya.

Kisah kedua contoh tersebut memberikan pelajaran yang sangat penting bagi pengembangan laba berbasis Pancasila. Kedua tokoh tersebut menunjukkan semangat kebersamaan walaupun pada akhirnya dikudeta melalui kekuatan politik. Selain itu, kedua tokoh tersebut sama sekali tidak memikirkan jumlah materi yang didapat karena keadilan merupakan hal utama yang harus ditegakkan. Laba seharusnya bersikap demikian walaupun terdapat dominasi oleh kekuatan korporasi (Mulawarman, 2012a). Bahkan, laba seharusnya membawa rakyat bergerak melakukan (r)evolusi ketika terdapat ketidakadilan dalam realitas

kehidupan. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi manusia dan akuntansi untuk mewujudkan pergerakan tersebut.

Jika kita memandang perspektif kedaulatan, semangat kebersamaan merupakan landasan penting untuk mewujudkan hal tersebut. Sebuah bangsa dapat disebut berdaulat jika seluruh elemen kehidupan bergerak bersama dalam satu tujuan kemandirian (Latif, 2012). Implikasinya, laba harus mengarahkan setiap unsur kehidupan untuk saling bekerja sama demi mencapai kemandirian. Laba tidak boleh sama sekali mengandung dan mengarahkan seluruh realitas kehidupan kepada ego demi menciptakan kedaulatan. Jika kondisi demikian telah tercapai, manusia dan akuntansi dapat merdeka dengan utuh.

Pada sisi lainnya, laba berbasis kebersamaan menunjukkan jati diri bangsa dalam aktivitas perekonomian. Sebuah tulisan dari Sy dan Tinker (2013) menunjukkan bahwa tidak semua negara memerlukan akuntansi berbasis ego dalam aktivitas perekonomian. Mereka membuktikan bahwa negara yang diteliti (Afrika) memiliki kondisi sosial yang berbeda dengan ontologi akuntansi berbasis ego. Hal ini tentu menjadi refleksi bagi Indonesia sebagai negara berdaulat yang harus memiliki akuntansi yang bernapaskan jati dirinya. Indonesia tidak perlu menggunakan “topeng” dalam landasan akuntansi ataupun aktivitas perekonomian.

Kita harus menyadari bahwa kebersamaan tidak timbul melalui kekuasaan atau paksaan dari pihak mana pun. Kebersamaan timbul melalui kesadaran bersama bahwa terdapat rasa persatuan sebagai pihak yang saling membutuhkan<sup>31</sup>. Hal ini juga berlaku bagi laba yang tidak boleh memaksakan kehendaknya (baca: standardisasi (Lee, 2013; Müller, 2014)) kepada semua pihak. Akuntansi seharusnya timbul dari nilai yang dianut oleh sebuah bangsa dan

---

<sup>31</sup> Lihat juga sila ketiga Pancasila mengenai persatuan bangsa.

bukan merupakan produk dari kekuasaan atau paksaan politis (Mulawarman, 2012a; Oehr dan Zimmermann, 2012).

Saya yakin bahwa jika akuntansi dibangun atas dasar kebersamaan, maka masyarakat memiliki kebebasan untuk membangun proses bisnis yang bermartabat. Kebebasan tidak berarti bahwa terdapat akses seluas-luasnya bagi setiap entitas untuk melaksanakan proses bisnis. Ketika Pancasila menjadi roh, kebebasan memiliki makna membangun dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan demi keutuhan seluruh elemen kehidupan (Bakry, 2010; Latif, 2015). Proses bisnis (dan akuntansi) seperti ini mampu membuat masyarakat untuk saling membangun tanpa adanya dikotomi dari golongan manapun. Hal ini tentu sangat indah dalam membangun sistem ekonomi (dan akuntansi) yang tidak berlandaskan ego.

Pada sisi lainnya, kebersamaan bukan hanya mengenai hubungan antarmanusia semata, melainkan terdapat alam semesta dan tentunya Tuhan sebagai unsur utama. Kebersamaan merupakan hubungan yang saling terkait antarelemen kehidupan. Jika keterkaitan ini rusak oleh ego salah satu unsur, aktivitas kehidupan (termasuk dalam ekonomi dan akuntansi) mengalami ketimpangan (Sitorus, 2016a). Oleh karena itu, setiap elemen kehidupan memiliki peran untuk saling menjaga hubungan.

Setiap elemen kehidupan pada hakikatnya saling manunggal (lihat bab 3 dan 4) antara satu dan yang lainnya. Hal ini bukan merupakan kebetulan karena segala sesuatu di dunia ini sejatinya dan seharusnya berpusat kepada Tuhan sebagai unsur utama kehidupan (Swasono, 2014). Kesadaran seperti ini seharusnya menjadi fokus bagi laba, terutama dalam arah proses akuntabilitas.

Kesadaran seperti ini masih belum terakomodasi dalam konsep Nilai Tambah Pancasila. Jika kita melihat lebih dalam pada rancangan konsep Nilai Tambah Pancasila (lihat Gambar 6.1), kebersamaan tersebut masih terbatas pada

proses bisnis berbasis kebebasan kepada Tuhan, manusia, dan alam semesta. Pemaknaan tersebut tentu menonjolkan manusia sebagai pusat peradaban walaupun terdapat pengakuan terhadap realitas lain yang tidak tampak. Hal ini lantas membuat manusia tetap diarahkan untuk menjadi pusat peradaban sehingga kemanunggalan antar-realitas tidak terjadi. Dalam perkataan lain, konsep Nilai Tambah Pancasila gagal mewujudkan kemanunggalan antar-realitas.

Kita harus berhati-hati terhadap laba yang hanya berfokus kepada unsur manusia semata. Laba apa pun yang hanya berfokus kepada manusia dan mengabaikan realitas kehidupan lainnya hanya menambah sikap egois dalam setiap aspek. Meskipun unsur ego dalam konsep Nilai Tambah Pancasila tidak sebesar PAT, hal tersebut tetap menjadi celah bagi tumbuhnya persaingan dalam segala aktivitas kehidupan (Saputro dan Triyuwono, 2009). Oleh karena itu, Pancasila harus hadir sebagai ideologi antikompromi untuk menghilangkan ego dalam diri manusia.

Akhirnya, kita mendapati bahwa kebersamaan merupakan hubungan yang saling terintegrasi. Kebersamaan bukan sekadar menghilangkan ego semata, tetapi juga mampu menggerakkan sejumlah masyarakat untuk terus bergerak membangun peradaban. Kebersamaan juga berarti menyatukan hubungan Tuhan, manusia, dan alam semesta, yang selama ini terpisahkan oleh PAT.

#### **6.5 Nilai Ketertundukan sebagai Antitesis Spiritual**

Kajian mengenai laba sejatinya tidak hanya berkutat mengenai hubungan sesama manusia semata. Laba juga mengarahkan hubungan manusia kepada Tuhan sebagai unsur utama kehidupan (Gallhofer dan Haslam, 2011; Molisa, 2011). Hal ini sejatinya merupakan kesadaran dari konsep Nilai Tambah Pancasila sebagai sintesis (ataupun antitesis) dari laba berbasis PAT yang notabene terlalu berfokus kepada materi. Konsep ini juga dirasa lebih mulia jika dibandingkan

dengan laba berbasis PAT yang sama sekali menegaskan keberadaan Tuhan dalam realitas kehidupan. Meskipun demikian, konsep Nilai Tambah Pancasila masih berpedoman kepada nilai spiritualitas yang notabene ingin lepas dari bayang-bayang agama.

Hal ini kemudian memunculkan pendekatan baru jika spiritual tidak menjadi nilai dalam laba. Triyuwono dalam pengantar buku (Kamayanti, 2017) menyatakan bahwa terdapat dua jenis pendekatan kepada Tuhan sebagai antitesis nilai spiritual. Pendekatan pertama adalah religiusitas. Pendekatan ini mengangkat agama sebagai jalan utama bagi hubungan manusia dan Tuhan (Mulawarman, 2010). Pendekatan religiusitas memiliki asumsi ontologi bahwa manusia tidak dapat lepas dari kaidah agama dan kitab suci. Ajaran agama dan kitab suci merupakan sentral utama bagi kehidupan manusia sehingga tidak boleh ada realitas lain yang menegaskan hal tersebut (Kamayanti, 2017). Hal-hal lain di luar ajaran kitab suci dan hukum Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan (Mulawarman, 2010). Dalam perkataan lain, manusia (dan akuntansi) harus berpedoman kepada ajaran agama dan kitab suci untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan.

Pada sisi lainnya, laba berbasis religiusitas hanya mengangkat agama sebagai basis akuntansi. Hal ini menunjukkan kelebihan sekaligus kelemahan dari pendekatan ini. Kelebihan dari pendekatan ini adalah laba memiliki pedoman yang jelas dalam mengarahkan manusia dan alam semesta menuju kedekatan kepada Tuhan (Kamla, 2009; Mulawarman dan Kamayanti, 2016). Meskipun demikian, pendekatan religiusitas dapat menjadi blunder ketika ajaran agama terlalu dimutlakan sehingga muncul pandangan yang mengafirkan pandangan lain yang juga berbasis hal tersebut (lihat Dixon dan Gaffikin 2014; Kamayanti 2013).

Bahkan, pandangan lain yang juga mengangkat basis ketuhanan juga tidak luput dari pengafiran tersebut<sup>32</sup>.

Laba dengan pendekatan religiusitas cocok jika diterapkan pada sekumpulan masyarakat berbasis agama tunggal. Meskipun demikian, laba berbasis religiusitas dikhawatirkan menjadi masalah dalam masyarakat yang menganut banyak agama ataupun tafsiran kehidupan. Hal ini didasarkan kepada ajaran kitab suci yang memiliki bentuk pengajaran berbeda bagi kehidupan sehingga terdapat multitafsir (ataupun pemaksaan terhadap ajaran agama). Oleh karena itu, laba berbasis religiusitas memerlukan kearifan bahwa setiap masyarakat memiliki tafsiran dan bentuk berbeda sehingga tidak muncul sikap saling mengafirkan.

Pada sisi lainnya, laba berbasis religiusitas sangat mungkin memunculkan sikap egois. Sikap egois ini tampak ketika akuntansi diharuskan bersandar kepada ajaran agama. Padahal, tidak semua manusia mampu menemukan hakikat dan esensi Tuhan pada ajaran agama. Manusia dapat menemukan Tuhan melalui berbagai jalan, seperti budaya dan kepercayaan (Latif, 2014). Dalam kaitannya dengan laba, sejumlah peneliti juga menemukan filosofi tersebut (lihat Triuwono, 2015a; Putra, 2013; Sitorus, et al. 2016), sehingga konteks agama dikesampingkan dalam temuan mereka. Oleh karena itu, saya merasa bahwa bukanlah pilihan yang tepat jika pendekatan religiusitas dimasukkan sebagai indikator laba.

Pendekatan kedua adalah keilahian. Pendekatan ini memiliki pandangan bahwa manusia terhubung kepada Tuhan ketika mendapatkan wahyu secara langsung. Hal ini disebabkan oleh ontologi bahwa manusia dan Tuhan tidak boleh

---

<sup>32</sup> Hal ini tampak dari tulisan Dixon & Gaffikin (2014) serta Gallhofer & Haslam (2011) yang mengkritisi pendapat Molisa (2011) mengenai spiritualitas akuntansi. Kedua penulis menggunakan perspektif salah satu agama untuk menampik argumen tersebut.

memiliki keterpisahan jarak (menyatu) dalam realitas kehidupan (Triyuwono, 2015b;2016)<sup>33</sup>. Kesatuan ini kemudian berimplikasi terhadap munculnya keyakinan bahwa Tuhan berkomunikasi dengan manusia melalui berbagai media (DeConick dan Adamson, 2012). Bahkan, mereka meyakini bahwa hubungan tersebut dapat muncul melalui pola pikir berbasis di luar empirisme rasional (Tooley, 2009).

Jika kita membandingkan pendekatan keilahian dengan religius atau spiritual, terdapat sedikit perbedaan mendasar. Jika pendekatan religius masih terbatas dalam konteks rasionalitas agama dan pendekatan spiritualis masih terkotak dalam objektivitas-subjektivitas kepercayaan serta kebudayaan, pendekatan keilahian bersifat mengandalkan subjektivitas individu (Triyuwono, 2015b). Pendekatan ini mengandalkan subjektivitas individu dengan asumsi kesatuan Tuhan dengan manusia yang sejatinya bersifat pribadi (DeConick dan Adamson, 2012). Pendekatan ini tidak mengandalkan teks kitab suci ataupun tradisi budaya dan kepercayaan dalam menghadirkan (atau menyatukan) Tuhan dalam realitas kehidupan manusia. Sebaliknya, penganut pendekatan keilahian percaya bahwa wahyu dari Tuhan sudah cukup memberikan jalan untuk membuat kesatuan hubungan (Tooley, 2009).

Jika kita memandang laba dengan pendekatan keilahian, dapat diperoleh pemahaman bahwa proses bisnis harus bisa menyatukan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini, akuntansi tidak bisa hanya berbicara mengenai dimensi rasional semata untuk menjadi penghubung antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Sebaliknya, akuntansi harus berperan sebagai sarana bagi manusia untuk menerima dan melaksanakan wahyu dari Tuhan. Akuntansi harus mengarahkan proses dan pengambilan keputusan bisnis untuk sepenuhnya tidak

---

<sup>33</sup> Meskipun demikian, kemanunggalan dalam pendekatan ilahi berbeda dengan kemanunggalan Pancasila. Jika kemanunggalan dengan pendekatan ilahi memiliki sifat subjektivitas.



berdasarkan unsur rasional, tetapi mengandalkan segala nubuat yang diyakini bersumber dari Tuhan. Semua informasi akuntansi harus bersumber dari perkataan Tuhan untuk memudahkan manusia (khususnya *stakeholder*) mendapatkan pewahyuan<sup>34</sup>.

Meskipun demikian, kita juga patut mengkritisi apakah hal tersebut dapat diwujudkan atau tidak dalam dunia nyata. Wahyu dari Tuhan pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk diperoleh karena memerlukan berbagai proses untuk mencapainya (DeConick dan Adamson, 2012). Hal ini tentu menjadi masalah karena akuntansi seharusnya juga memberikan informasi yang bersifat instan dalam proses bisnis. Dalam sudut pandang rasional, wahyu dari Tuhan sangat sulit untuk turun ketika menghadapi permasalahan yang bersifat mendadak. Manusia perlu melakukan serangkaian proses untuk mendapatkan wahyu dari Tuhan sehingga hal tersebut memerlukan proses yang lama. Meskipun demikian, wahyu dari Tuhan dapat turun secara cepat ketika manusia telah memiliki kebiasaan untuk membangun komunikasi dengan Tuhan (Swinburne, 2007).

Pada sisi lainnya, pendekatan keilahian juga dapat lekat dengan sikap egois layaknya spiritual dan religi. Kita tidak tahu apakah Tuhan memberikan wahyu yang bersifat umum atau secara khusus kepada individu tertentu. Hal ini tentu menjadi sebuah bentuk keegoisan ketika wahyu yang diterima pada diri seseorang digeneralisasi dalam informasi akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, pendekatan keilahian mengakui unsur subjektivitas yang sangat kental

---

<sup>34</sup> Konsep seperti ini pernah diusulkan oleh Triyuwono (2006) walaupun masih berada dalam paradigma posmodernisme. Meskipun demikian, laba yang diusulkan masih menggunakan pemikiran tokoh lain (Syekh Siti Jenar) sehingga tidak murni menggunakan pendekatan keilahian. Pada sisi lainnya, pendekatan seperti ini juga ditentang oleh peneliti akuntansi yang berada dalam paradigma religius (lihat Saputro & Triyuwono 2009).

sehingga konteks egois tentu masih melekat. Oleh karena itu, pendekatan keilahian juga tidak dapat dimasukkan dalam indikator laba.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan yang memiliki kekurangan sama sekali. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan jika ditinjau dalam berbagai perspektif. Meskipun demikian, saya melihat bahwa terdapat satu tujuan utama dari masing-masing pendekatan, yaitu ketertundukan. Pendekatan spiritual, religi, dan keilahian sama-sama mengakui bahwa Tuhan merupakan unsur utama dalam realitas kehidupan. Meskipun ketiga pendekatan tersebut memiliki perbedaan bentuk, tetapi semuanya menyadari bahwa manusia merupakan pribadi yang rendah dan hal tersebut berlaku sebaliknya kepada Tuhan. Inilah kata kunci utama yang dapat menjadi titik tengah dari ketiga pendekatan tersebut.

Ketertundukan merupakan hubungan yang penting daripada meributkan pendekatan untuk mencari Tuhan. Sikap ketertundukan inilah yang membawa manusia memiliki *common sense* bahwa cara memandang Tuhan merupakan ranah pribadi setiap manusia dan tidak bisa dipaksakan. Manusia sejatinya tidak boleh terjerumus dalam proses pencarian keberadaan Tuhan selama hidupnya. Dalam hal ini, jebakan tersebut termanifestasi dalam penggambaran manusia terhadap keberadaan Tuhan sebagai sesuatu yang mutlak sehingga berimplikasi terhadap hilangnya keberagaman dalam proses pencarian hakikatnya.

Jika kita menghubungkan dengan sila ketuhanan Pancasila, cara pandang seperti ini merupakan bentuk perwujudan ketuhanan yang berbudaya (Latif, 2014). Bentuk seperti ini menuntut manusia untuk memiliki pendirian terhadap keberadaan Tuhan sebagai realitas kehidupan tanpa harus mengafirkan realitas lain yang juga sama-sama bertuhan (Kaelan, 2010; Latif, 2012). Dalam hal ini, baik agama, kepercayaan, budaya, maupun wahyu memiliki posisi penting sebagai jalan bagi manusia untuk mendekati diri kepada Tuhan. Hal ini kemudian

melahirkan bentuk *bhineka tunggal ika* dalam hubungan Tuhan dan realitas kehidupan lainnya (Swasono, 2014).

Jika kita membawa pendekatan ketertundukan dalam ranah laba, kita bisa memahami bahwa konsep ini seharusnya memiliki rasa toleransi. Akuntansi sejatinya tidak boleh memenjarakan manusia dalam pendekatan tunggal berlabel ketuhanan. Sebaliknya, akuntansi seharusnya memberikan pembebasan kepada manusia untuk mendekati diri kepada Tuhan. Jika akuntansi terkurung dalam pendekatan tunggal, hal tersebut tidak jauh berbeda dengan logika PAT dan laba.

Pada sisi lainnya, ketika manusia memiliki pendekatan berbeda dalam mengenal Tuhan, pada titik inilah sifat egois hilang (Sitorus, 2015). Akuntansi dan manusia dituntut untuk saling menghormati dalam proses dialektika keberadaan Tuhan yang berbeda, khususnya ketika nilai-nilai Pancasila telah menjadi keyakinan. Oleh karena itu, pendekatan ketertundukan dapat terlaksana jika manusia memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam memahami hakikat keberadaan dan kesatuan Tuhan.

Inilah esensi pendekatan ketertundukan sebagai antitesis spiritualitas pada konsep Nilai Tambah Pancasila. Pendekatan ini tidak membatasi manusia untuk menemukan jati dirinya kepada Tuhan. Sebaliknya, pendekatan ini menawarkan fleksibilitas tanpa mengubah keberadaan Tuhan sebagai pusat dari realitas kehidupan. Melalui pendekatan ketertundukan, akuntansi dan manusia diarahkan untuk menghasilkan realitas kehidupan yang toleran dan penuh cinta kasih.

## **6.6 Konsep Kemaslahatan Pancasila sebagai Laba**

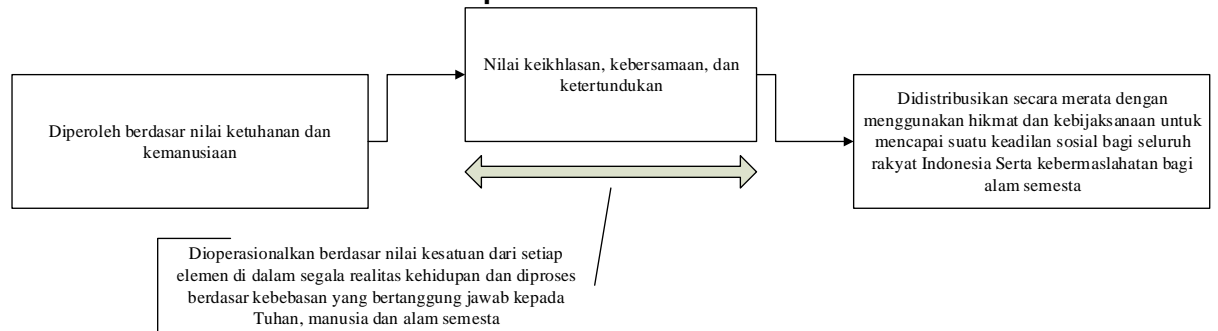
Akhirnya, saya telah menguraikan beberapa nilai yang dapat menjadi antitesis dari konsep Nilai Tambah Pancasila. Seluruh nilai tersebut pada dasarnya menggantikan nilai yang tidak relevan dengan Pancasila sebagai ideologi kebersamaan dan pembebasan. Selain itu, penggantian nilai tersebut

menunjukkan upaya menjadikan Pancasila sebagai ideologi antikompromi, khususnya dalam kaitannya dengan bidang akuntansi. Meskipun demikian, nilai tersebut juga melengkapi nilai yang sudah relevan dengan pemikiran Pancasila sehingga perumusan yang telah diuraikan sebelumnya bersifat mengoreksi *status quo* (Nilai Tambah Pancasila). Dalam hal ini, saya hanya melakukan koreksi atas nilai yang tidak tepat tanpa mengganti secara total (rekonstruksi).

Pada sisi lainnya, saya melihat perlunya penggantian nama terhadap laba yang diusulkan. Pergantian tersebut merupakan upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai cara pandang yang mandiri dan tidak berada dalam bayang-bayang paradigma lain. Selain itu, pergantian nama juga merupakan upaya perubahan ontologi dan epistemologi menuju konsep baru yang telah diusulkan sebelumnya (lihat bab 3 dan 4). Jika pergantian nama tidak dilakukan, laba yang diusulkan masih menggunakan paradigma lama, baik secara ontologi maupun epistemologi. Oleh karena itu, saya membuat nama baru, yaitu konsep Kemaslahatan Pancasila.

Mengapa konsep kemaslahatan Pancasila? Konsep ini berangkat dari tujuan manusia dan akuntansi Pancasila yang tidak berbicara mengenai *self interest*. Berbeda dengan keuntungan berbasis PAT ataupun Nilai Tambah Pancasila, konsep ini merupakan upaya menjadikan manusia dan akuntansi sebagai penyebar kemaslahatan bagi segala realitas kehidupan. Hal ini tentu menuntut laba yang juga bersifat demikian untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut. Secara garis besar, konsep Kemaslahatan Pancasila tercermin melalui Gambar 6.2.

**Gambar 6.2 Konsep Kemaslahatan Pancasila**



Gambar tersebut menunjukkan perubahan jika dibandingkan dengan konsep Nilai Tambah Pancasila versi Parikesit (2012a). Perubahan tersebut tampak dari digantikannya sejumlah nilai sebagai antitesis konsep Nilai Tambah Pancasila, khususnya pada aspek pemrosesan *input* dan *output* (bagian tengah dan kanan) dari aktivitas bisnis. Selain itu, perubahan lainnya tampak dari dihapuskannya nilai materi sebagai indikator laba. Tentunya perubahan tersebut menunjukkan upaya penyingkiran ego dalam aktivitas perekonomian berbasis Pancasila. Meskipun demikian, gambar tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa nilai yang sama karena relevan dengan basis pemikiran Pancasila.

Perubahan lainnya tampak dari dimunculkannya alam semesta sebagai bagian dari realitas kehidupan. Hal ini merupakan bentuk pengembalian kedudukan alam semesta yang selama ini termarginalkan dalam keuntungan berbasis PAT. Bahkan, konsep Nilai Tambah Pancasila hanya mengakui alam semesta sebatas lingkungan terdampak dari kegiatan operasional perusahaan (lihat Gambar 6.1). Jika alam semesta tidak diakui dalam realitas laba, terdapat analogi bahwa alam semesta layak untuk termarginalkan melalui laba. Hal ini sangat dihindari dalam kerangka pemikiran Kemaslahatan Pancasila.

Alasan lain di balik pengakuan alam semesta adalah tidak terbatasnya kemaslahatan dalam perspektif Pancasila. Kita tidak boleh terjebak pada konteks akuntansi yang hanya berfokus kepada manusia semata. Sebaliknya, kita harus menyadari bahwa kemaslahatan sejatinya tidak terbatas kepada hubungan Tuhan dan manusia semata, tetapi terdapat alam semesta yang juga berperan dalam realitas kehidupan. Bahkan, alam semesta juga tidak hanya mencakup unsur fisik semata, tetapi juga meliputi unsur kefanaan dalam realitas kehidupan. Semangat inilah yang seharusnya diakui dalam laba sebagai patokan dalam aktivitas perekonomian.

Pada kaitannya dengan aspek kebermanfaatan, konsep Kemaslahatan Pancasila juga memiliki perubahan signifikan. Salah satu perubahan tersebut tampak dalam unsur materi. Jika konsep Nilai Tambah Pancasila masih berkuat pada penggabungan unsur materi dan nonmateri (melalui filosofi sinergi oposisi biner), hal tersebut tidak berlaku pada konsep Kemaslahatan Pancasila (lihat Tabel 6.1). Hal ini memang dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa materi seharusnya menjadi penunjang belaka. Selain itu, penghilangan unsur materi juga dilakukan supaya manusia tidak terpaku kepada materi dalam melakukan aktivitas kehidupan. Inilah sejatinya puncak dari aktivitas perekonomian yang berbasis kepada paradigma Pancasila.

**Tabel 6.1 Perbandingan Konsep Nilai Tambah dan Kemaslahatan Pancasila**

No	Sila	Nilai Tambah Pancasila	Kemaslahatan Pancasila
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	Uang, kepuasan batin, keikhlasan, rasa senang akan kehadiran Tuhan	Kedekatan dengan Tuhan dan alam semesta
2	Kemanusiaan yang adil dan Beradab	Uang, rasa senang, kepuasan hati	Kepuasan hati, saling membangun, dan menyatukan diri dengan alam semesta
3	Persatuan Indonesia	Uang, solidaritas (rasa persaudaraan dan loyalitas)	Solidaritas dan rasa saling peduli dengan sesama manusia dan alam semesta

4	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan	Uang dan perasaan bebas	Tanggung jawab, dan bijaksana, solidaritas
5	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Uang, kepuasan batin, rasa senang, rasa syukur dan rasa ikhlas	Kepuasan batin, tanggung jawab, bersyukur, ikhlas, dan solidaritas

Sumber: Parikesit (2012a) dengan Penambahan pada Kemaslahatan Pancasila

Hal-hal seperti ini tentu bertentangan dengan sifat PAT dan laba sebagai bidang yang terukur dan mengutamakan unsur materi. Bahkan, hal ini juga memiliki pertentangan dengan aktivitas perekonomian global yang selalu berpusat kepada materi. Meskipun demikian, ketika akuntansi dan manusia telah berbasis kepada Pancasila, unsur materi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah bentuk kompromi. Beberapa hal tersebut akan memberikan urgensi untuk melepaskan unsur materi dalam konsep Kemaslahatan Pancasila.

*Pertama*, saya mengakui bahwa aktivitas perekonomian (termasuk dalam kaitannya dalam bidang akuntansi) selalu melibatkan materi. Meskipun demikian, materi sejatinya bukanlah realitas utama yang patut ditonjolkan dalam akuntansi (Kamayanti, 2016b). Realitas sesungguhnya adalah kesatuan Tuhan, manusia, dan alam semesta yang sejatinya tidak dapat tercermin dari keberadaan materi (Molisa, 2010). Jika akuntansi dan manusia tetap menganggap materi sebagai bagian dari realitas, keberadaannya tetap sebagai unsur utama dan tidak pernah tergantikan (Molisa, 2011; Kamayanti, 2013).

*Kedua*, fokus dari konsep Kemaslahatan Pancasila adalah bagaimana mengarahkan setiap entitas kehidupan untuk menjadi berkah. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar jika materi masih dimasukkan sebagai indikator proses bisnis dan keberuntungan konsep Keberkahan Pancasila. Selain itu, unsur materi pada dasarnya menjadi pusat dari persetujuan antarentitas pada aktivitas kehidupan

(Bellamy dan Foster, 2013; Edgley, 2014). Oleh karena itu, materi tidak dapat menjadi berkah dalam akuntansi yang menonjolkan unsur tidak terukur.

*Ketiga*, konsep Kemaslahatan Pancasila menekankan bahwa akuntansi merupakan sarana untuk merekatkan seluruh realitas kehidupan (Tuhan, manusia, dan alam semesta). Pada tahap ini, saya memandang bahwa merupakan hal yang aneh apabila seluruh elemen kehidupan diukur dengan menggunakan materi. Hal ini menjadi rancu jika akuntansi mengukur kedekatan kepada Tuhan dalam satuan materi. Selain itu, hal ini justru menunjukkan ketidaklayakan jika akuntansi mengukur kebersamaan dengan sesama manusia dalam satuan materi. Jika hal ini tetap dilakukan, akuntansi Pancasila terjebak dalam rasionalitas berbasis materi layaknya PAT dan laba.

Pada sisi lainnya, konsep Kemaslahatan Pancasila menghasilkan nilai tanggung jawab terhadap realitas kehidupan. Pemikiran ini tentu berbeda dengan perasaan bebas yang tercantum dalam kebermanfaatan Nilai Tambah Pancasila. Meskipun Parikesit (2012a), selaku pencetus konsep Nilai Tambah Pancasila, mengatakan bahwa kebebasan yang diungkapkan tetap dibatasi oleh rasa tanggung jawab, hal ini tidak mengubah ego di balik rasa bebas, terlebih jika hal tersebut dikombinasikan dengan unsur materi. Sebaliknya, jika tanggung jawab menjadi pengganti dari rasa bebas, manusia diarahkan menggunakan hikmat dan kebijaksanaan dalam aktivitas perekonomian.

**Tabel 6.2 Hasil Konsep Kemaslahatan Pancasila**

No	Nilai	Bentuk Nilai
1	Kesejahteraan Sosial	Distribusi materi secara adil
2	Mental	Keikhlasan, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi
3	Ketertundukan	Pengamalan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan dalam aktivitas perekonomian



Pada perspektif hasil, konsep Kemaslahatan Pancasila menghasilkan tiga nilai utama, yaitu kesejahteraan sosial, mental, dan ketertundukan. Ketiga nilai tersebut memberikan perbedaan jika dibandingkan dengan konsep Nilai Tambah Pancasila (lihat Tabel 6.2). Perbedaan pertama adalah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai pengganti dari nilai ekonomi. Perbedaan ini menjadi penegasan bahwa konsep Kemaslahatan Pancasila berusaha untuk menyingkirkan ego dalam aktivitas perekonomian. Meskipun keberadaan materi tidak dihilangkan, unsur ini juga tidak dijadikan sebagai prioritas dalam aktivitas perekonomian.

Pada sisi lainnya, perubahan ini berimplikasi kepada kedudukan materi yang tidak dijadikan sebagai patokan pemenuhan *self interest*. Konsep Kemaslahatan Pancasila justru menjadikan materi sebagai salah satu sarana<sup>35</sup> untuk mewujudkan peradaban yang adil. Ketika masyarakat merasa bahwa terjadi ketidakadilan dalam aktivitas perekonomian (khususnya pada aspek pendistribusian materi), terjadi pergerakan sosial untuk mewujudkan keadilan.

Perbedaan kedua adalah perubahan definisi dari nilai mental. Jika Nilai Tambah Pancasila mendefinisikan nilai mental sebagai bentuk dari kepuasan batin, rasa senang, solidaritas, dan perasaan bebas, hal berbeda terjadi dalam konsep Kemaslahatan Pancasila. Konsep Kemaslahatan Pancasila justru mengarahkan manusia untuk tidak mengutamakan perasaan senang yang ada dalam dirinya, melainkan mengutamakan keikhlasan dan kebersamaan pada aktivitas perekonomian. Perubahan ini justru menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia (khususnya *homo pancasilaus*) harus membaaur dengan masyarakat dan tidak mengutamakan kepentingannya sendiri.

---

<sup>35</sup> Penggunaan kata "salah satu sarana" digunakan sebagai penekanan karena sebenarnya keadilan (khususnya Pancasila) tidak selalu berkuat mengenai materi (lihat hakikat manusia sebagai *homo pancasilaus*).

Perbedaan ketiga adalah nilai ketertundukan sebagai pengganti dari spiritualitas. Perubahan ini menjadikan manusia tidak lagi terbelenggu pada satu metode dalam bertuhan. Pembahasan sebelumnya (Bab V) telah menyatakan bahwa akuntansi seharusnya tidak membatasi kesadaran manusia dalam bertuhan dan hal tersebut merupakan bentuk akomodasi dari konsep Kemaslahatan Pancasila. Ketika nilai ketertundukan dijadikan landasan bagi alternatif laba, manusia menemukan perasaan bebas untuk mengamalkan segala keyakinannya dalam bertuhan.

Perubahan ini juga mengarahkan manusia dan akuntansi untuk menjadikan materi sebagai pemberian (*rejek*i, *given*, *rizqi*) dari Tuhan. Manusia tidak lagi menganggap materi sebagai sesuatu yang dikejar, terutama pada aspek pemenuhan kebutuhan diri. Sebaliknya, manusia menjadikan materi sebagai sarana berkontribusi bagi ketertundukan kepada Tuhan. Manusia tidak menjadikan materi sebagai prioritas utama dalam aktivitas perekonomian karena kesadarannya terhadap kehendak Tuhan telah tertanam dalam dirinya.

Saya mengakui bahwa konsep yang diajukan memiliki pertentangan dengan keuntungan berbasis PAT ataupun Nilai Tambah Pancasila. Meskipun demikian, konsep tersebut tidak dapat menghilangkan sikap ego dan ketidakjelasan kedudukan Tuhan pada laba. Oleh karena itu, konsep Kemaslahatan Pancasila hadir sebagai antitesis untuk menghilangkan ego dan keegosian manusia serta akuntansi dalam realitas kehidupan.

Konsep Kemaslahatan Pancasila pada hakikatnya merupakan bagian dari dialektika laba. Dalam hal ini, saya menyadari bahwa konsep ini dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan perspektif mengenai akuntansi Pancasila. Oleh karena itu, koreksi terhadap konsep ini sangat memungkinkan pada masa mendatang.

### 6.7 Konsep Laba *vis a vis* Kemaslahatan Pancasila

Berbagai uraian tersebut kemudian memberikan bentuk antitesis terhadap laba. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa konsep Kemaslahatan Pancasila dapat menjadi antitesis bagi laba. Selain itu, kedudukan Pancasila sebagai ideologi antikompromi sekaligus paradigma utama bagi bangsa Indonesia memiliki implikasi bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk akuntansi, harus selaras dengan unsur ini. Ketika nilai-nilai yang terkandung dalam laba tidak mencerminkan karakteristik Pancasila, terjadilah antitesis terhadap laba. Setelah antitesis terbentuk, terjadilah perubahan terhadap aspek laba secara ontologi. Hal tersebut tercermin dalam konsep Kemaslahatan Pancasila sebagai alternatif laba. Secara garis besar, perubahan tersebut tercermin dalam Tabel 6.3.

**Tabel 6.3 Laba *vis a vis* Kemaslahatan Pancasila**

<b>Laba</b>	<b>Konsep Kemaslahatan Pancasila</b>
Basis: Maksimalisasi nilai materi	Basis: Kesejahteraan sosial demi ketertundukan kepada Tuhan
Indikator: Tercapai dengan pemenuhan materi	Indikator: Tercapai dengan mengalirkan materi untuk seluruh pihak (ibadah)

Perubahan yang paling mendasar adalah proses bisnis yang tidak lagi terpaku kepada materi. Ketika laba berpatokan kepada proses bisnis berbasis materi, hal tersebut bertolak belakang dengan konsep Kemaslahatan Pancasila. Konsep Kemaslahatan Pancasila justru berusaha untuk mengalirkan materi kepada semua pihak. Bahkan, konsep Kemaslahatan Pancasila justru lebih mengutamakan unsur nonmateri. Hal tersebut tercermin dalam manfaat yang diperoleh atas aktivitas perekonomian di mana nilai materi tidak menjadi indikator (Tabel 6.1). Perubahan ini justru menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya terbentuk atas unsur-unsur nonmateri, khususnya ketika kita membandingkannya dengan masing-masing sila.

Perubahan tersebut kemudian memberikan arah bagi pengambilan keputusan yang tidak lagi mengarahkan manusia kepada oportunitas. Jika laba membentuk manusia sebagai pribadi yang oportunis dalam hal materi, hal sebaliknya justru terjadi dalam konsep Kemaslahatan Pancasila. Dalam hal ini, manusia tidak dilarang untuk mencari materi dalam aktivitas perekonomian. Meskipun demikian, kedudukan materi digeser sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan. Manusia diarahkan untuk mengutamakan hal-hal yang menunjang kemaslahatan bersama dalam melakukan pengambilan keputusan karena pada dasarnya aktivitas perekonomian (khususnya dalam perspektif Pancasila) tidak dilakukan bagi satu pihak semata, tetapi tertuju kepada kehendak rakyat (Yudiatmaja, 2011; Swasono, 2013).

Hal demikian kemudian memberikan bentuk pengambilan keputusan akuntansi yang ditujukan kepada kemaslahatan bagi semua pihak. Dalam hal ini, aktivitas perekonomian tidak lagi ditujukan untuk memenuhi kepentingan setiap individu yang pada akhirnya melahirkan sifat oportunis, tetapi seluruh pihak harus merasakan manfaat dalam kegiatan tersebut. Kemaslahatan ini tentu selaras dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial di mana mereka sejatinya tidak dapat berpatokan kepada kehendaknya sendiri, tetapi bersinergi dengan setiap golongan. Selain itu, kedudukan manusia sebagai *homo pancasilaus* sejatinya memberikan bentuk kesadaran bahwa sifat oportunis tidak bisa diterima dalam negara yang terdiri atas berbagai macam golongan.

Dalam perspektif cara untuk melakukan pengambilan keputusan, konsep Kemaslahatan Pancasila mengarahkan manusia untuk tidak mengedepankan rasionalitas dalam aktivitas perekonomian. Pengambilan keputusan yang mengedepankan rasionalitas manusia justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi berbasis nonmateri. Selain itu, pengambilan keputusan berbasis rasionalitas justru menjadikan manfaat konsep Kemaslahatan Pancasila

tidak dapat dirasakan oleh setiap pihak. Konsep Kemaslahatan Pancasila, yang notabene mengutamakan unsur nonmateri dalam aktivitas perekonomian, tidak dapat dilaksanakan pada kehidupan nyata ketika rasionalitas menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.

Perubahan ini kemudian memberikan arah dalam konsep Kemaslahatan Pancasila kepada penggunaan hikmat dan kebijaksanaan yang dimiliki daripada mengejar kebebasan yang seluas-luasnya. Sifat rasional tentu tidak dapat dihilangkan dalam diri manusia dan akuntansi karena hal tersebut sudah melekat sejak diciptakannya segala realitas kehidupan (lihat Bab 3). Meskipun demikian, pola pengambilan keputusan berbasis rasionalitas hanya menjadi penunjang dalam konsep Kemaslahatan Pancasila karena terdapat perspektif lain yang jauh lebih utama daripada hal ini. Penggunaan hikmat dan kebijaksanaan dalam diri manusia dan akuntansi menentukan seberapa jauh pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan rasionalitas dilakukan.

Hal seperti ini tentu memberikan aktivitas ekonomi yang tidak lagi berbasis kepada *freewill* dalam diri manusia dan akuntansi modern. Sifat tersebut menjadi luntur dengan konsep Kemaslahatan Pancasila yang mengarahkan manusia dan akuntansi untuk menggunakan hikmat dan kebijaksanaan dalam aktivitas perekonomian. Selain itu, sifat *freewill* menjadi luntur karena Pancasila (melalui konsep Kemaslahatan Pancasila) memiliki nilai-nilai yang menjadikan manusia dan akuntansi tidak berperilaku sebebas-bebasnya dalam aktivitas perekonomian. Hal ini terlihat dari beberapa sifat yang telah luntur ketika konsep Kemaslahatan Pancasila dijadikan sebagai laba.

Pada aspek yang lebih luas, konsep Kemaslahatan Pancasila memberikan arah bagi manusia untuk bertuhan dalam aktivitas perekonomian. Hal ini dilakukan karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada dasarnya menekankan manusia dan segala aspek di dalamnya untuk bertuhan melalui keyakinannya

sehingga penegasian terhadap keberadaannya (seperti laba) menunjukkan pertentangan terhadap ideologi ini. Dalam hal ini, keberadaan Tuhan harus termanifestasi dalam setiap aktivitas perekonomian dan aspek turunannya, khususnya akuntansi, mulai dari awal hingga akhir dari hal tersebut. Bahkan, ketika konsep Kemaslahatan Pancasila telah menjadi laba, ketuhanan menjadi budaya yang melekat dalam aktivitas perekonomian.

Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa konsep Kemaslahatan Pancasila, sebagai laba alternatif, memberikan gambaran proses bisnis yang bertolak belakang dengan laba. Bahkan, konsep Kemaslahatan Pancasila lebih menekankan bentuk antitesis kepada laba daripada Nilai Tambah Pancasila yang masih sekadar sintesis. Meskipun demikian, hal tersebut masih belum bisa memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai implikasi terhadap manusia dan aktivitas perekonomian ketika konsep Kemaslahatan Pancasila diterapkan sebagai laba. Hal tersebut memerlukan tinjauan lebih lanjut dalam bentuk refleksi terhadap kemaslahatan bersama, khususnya dalam aktivitas perekonomian.

## 6.8 Kesimpulan

Bab ini pada dasarnya memberikan koreksi terhadap konsep Nilai Tambah Pancasila sebagai laba. Hal ini dilakukan untuk membentuk laba yang benar-benar sesuai dengan kaidah Pancasila. Koreksi tersebut dilakukan dengan memberikan sejumlah nilai yang menjadi antitesis dari konsep Nilai Tambah Pancasila dan meramunya dalam bentuk yang baru. Perubahan bentuk tersebut kemudian terwujud dalam konsep Kemaslahatan Pancasila.

Konsep Kemaslahatan Pancasila pada dasarnya menekankan upaya akuntansi menjadi rahmat bagi setiap realitas kehidupan. Selain itu, konsep Kemaslahatan Pancasila juga mengakui alam semesta sebagai realitas kehidupan yang sejajar dengan manusia. Konsep Kemaslahatan Pancasila menghapus celah materi dan *self interest* yang masih melekat pada konsep Nilai Tambah Pancasila. Meskipun demikian, konsep Kemaslahatan Pancasila masih memerlukan ruang dialektika untuk pengembangan lebih lanjut.

Dalam aspek definisi, konsep Kemaslahatan Pancasila memberikan pemaknaan yang berbeda dalam laba. Jika laba didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban yang berujung kepada akumulasi materi (Triyuwono, 2011; Parikesit, 2012a), konsep Kemaslahatan Pancasila dimaknai sebagai dampak yang ditimbulkan oleh entitas bagi kemaslahatan setiap realitas kehidupan. Definisi ini juga memberikan perbedaan makna dengan konsep Nilai Tambah Pancasila yang masih menekankan kepada kontribusi entitas dalam unsur materi dan nonmateri (Baydoun dan Willett, 2000; Parikesit, 2012a).